

ANARKI DALAM AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA PERSPEKTIF ORGANISASI KEMAHASISWAAN EKSTRA KAMPUS BEBASIS AGAMA KOTA PADANG

Dr. Sefriyono M.Pd.

Dosen Sosiologi Agama UIN Imam Bonjol Padang

A. Latar Belakang Masalah

Peran mahasiswa sebagai katalisator perubahan sosial sudah menjadi bukti sejarah di Indonesia. Peralihan kekuasaan yang silih berganti di negara ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan yang digagas dan dilakukan oleh mahasiswa. Fasli Jalal (dalam Eka Widya Putra Dkk, 2003: v) mengatakan, di negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia, peran gerakan mahasiswa dalam perubahan sosial politik sangat menonjol dan diperhitungkan. Diperhitungkan, bukan saja karena karakter idealisme yang melekat pada diri mereka, tetapi juga lantaran visi, misi, dan orientasinya sebagai pembaharu di tengah masyarakat.

Dalam sejarah gerakan mahasiswa dan kaum muda di Indonesia, peran transformasi sosial yang dilakukan mahasiswa telah berjalan dengan baik dan telah berlangsung sangat lama. Pergerakan ini telah dimulai sebelum bangsa ini eksis sebagai sebuah negara. Bisa dikatakan, adanya negara ini berkat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Lahirnya Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PMI) yang diprakarsai oleh mahasiswa yang sedang belajar di Belanda pada tahun 1925 merupakan momentum awal dari semua gagasan dan ide tentang sebuah gerakan perubahan kaum muda yang plural dan terorganisir secara moderen, yang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari cengraman kolonialisme Belanda.

Ada dua hal yang menarik dari gerakan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia ini: *Pertama*, gerakan mahasiswa ini telah mampu mengatasi hambatan *etnosentrisme* bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan nasionalisme; *kedua*, gerakan ini juga telah mampu memperjuangkan nama Hindia (Indier) dari istilah pribumi (Inlander) yang dilabelkan kepada masyarakat jajahan Belanda. Pengalihan nama ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kepentingan bersama orang Hindia di negeri Belanda dan memelihara hubungan dengan Belanda (Nakazumi, 1997).

Pada masa Orde lama, ketika PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, kesatuan aksi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti HMI, PII, GMKI, SOMAL, Mahasiswa Pancasila, dan IPMI yang terbentuk 25 Oktober 1966, bersama TNI telah berhasil menumpas PKI dan kekuasaan Soekarno.

Tumbangannya kekuasaan Orde Lama, melahirkan kekuasaan baru yang lazim disebut dengan Orde Baru. Ada dua peristiwa penting yang melibatkan mahasiswa pada masa Orde baru yakni: *Pertama*, terjadinya petaka lima belas Januari atau yang lazim disebut dengan peristiwa MALARI. Peristiwa ini diawali dengan terjadinya banyak tindak korupsi di tubuh pemerintah dan masyarakat mengalami kemiskinan, akibat naiknya harga beras. Maka mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut penurunan harga. Namun demonstrasi besar-besaran tersebut berubah menjadi satu kerusuhan sosial besar, sehingga terjadi penjarahan yang memakan banyak korban; *kedua*, pada tahun 1998, gerakan mahasiswa menuntut reformasi karena Orde Baru telah banyak melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Melalui pendudukan gedung DPR/MPR, akhirnya mahasiswa berhasil memaksa presiden Soeharto melepaskan jabatannya (Ricky Anggili dalam <http://rickyanggili.blogspot.com>. diakses 4 April 2012).

Kontrol mahasiswa terhadap laju kekuasaan juga berlangsung setelah reformasi bergulir. Salah satu kebijakan pemerintah yang selalu dikritisi oleh mahasiswa adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tersebut bukan merupakan kebijakan yang tepat karena akan merugikan masyarakat, apalagi semenjak krisis ekonomi pada tahun 1998 tidak terlihat perubahan yang signifikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Menaikan harga BBM dalam kondisi rakyat semacam ini, bagi mahasiswa merupakan pengkhianatan terhadap hati nurani rakyat oleh pemerintah sebagai pengembal amanah rakyat (Elsya Crownia, 2012, dalam <http://padangekspres.co.id>. diakses 12 April 2012).

Gerakan menuntut dipertimbangkannya kenaikan harga BBM oleh pemerintah berlangsung secara masif di hampir seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Gerakan Penolakan kenaikan harga BBM ini tidak selalu berjalan dengan baik, tidak jarang aksi demonstrasi ini berujung pada tindakan anarki seperti menyerang pos polisi, membakar ban dan memblokir jalan, serta menghambat gerak masyarakat sekitar yang mayoritas dalam perjalanan mencari nafkah.

Di Sumatera Barat, sama halnya dengan daerah lain, demonstrasi mahasiswa juga tidak luput dari keributan. Nasip apes menimpa seorang demonstran saat turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM di Padang, Sumatera Barat, Kamis tanggal 29 Maret 2012--seorang demonstran dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jefri, terluka karena digigit anjing polisi. Insiden itu bermula saat aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Sumbar ricuh. Sekitar jam 15.00, demonstran dan aparat keamanan terlibat saling lempar dengan menggunakan botol air mineral dan batu. Massa mahasiswa dan polisi saling berhadapan-hadapan. Jefri sebenarnya berniat meredakan emosi kawan-kawannya agar tidak bertindak anarkis. Dia berada di antara barisan demonstran dan polisi. Saat itulah, anjing yang di bawa oleh polisi beraksi. Anjing yang terikat tali dan dipegang oleh polisi itu tiba-tiba menyerang Jefri. Akibatnya, tangan kanan Jefri terluka. Dia dilarikan ke Rumah Sakit Yos Sudarso dan mendapatkan suntikan anti rabies. Demonstran sempat memblokir akses Jalan Khatib Sulaeman di depan Gedung DPRD Sumatera Barat. Dalam aksi ini, polisi juga sempat mengamankan satu orang demonstran yang diduga sebagai provokator (<http://nasional.vivanews.com>, diakses 4 April 2012).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pertanyaan-pertanyaan penting yang mesti dijawab dalam makalah ini adalah apa itu anarki?, apa pandangan mahasiswa terhadap anarki dalam demonstrasi?, mengapa demonstrasi mahasiswa cenderung anarki?, bagaimana peran agama dalam demonstrasi anarki?. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam makalah yang disadur dari hasil penelitian ini.

1. Anarki

Istilah anarki lebih banyak dipakai dalam konteks politik. Ostler (1990:17) mengatakan, kata “anarki” berasal dari kata “anarchy” dengan makna ‘lack of government’ yang diartikan dengan tidak adanya pemerintahan sehingga terjadi kealpaan terhadap nilai dan norma. Sedangkan istilah anarkisme berasal dari kata “anarchisme” dengan makna “belief that government and law should be abolished”, yang diartikan dengan kepercayaan bahwa pemerintahan dan hukum harus disingkirkan.

Dalam berbagai gerakannya kelompok anarkis kerap menggunakan kekerasan sebagai metode yang mereka anggap cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-ide yang dimiliki. Salah satu slogan kelompok anarkis Durruti di Spanyol seperti “terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan” yang sangat sarat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan. Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan dengan metode “propaganda by the deed”, yaitu metode gerakan dengan menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga meleakalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan (<http://id.wikipedia.org>. diakses 29 Agustus 2012).

2. Demonstrasi Anarkis dalam Perspektif Mahasiswa

Demonstrasi merupakan medium mahasiswa untuk mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan pemikiran, gagasan, pendapat, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Demonstrasi merupakan metode perjuangan dengan mengandalkan kekuatan massa dalam rangka menekan pemerintah atau pihak lain, untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, demonstrasi telah menjadi cara bagi orang-orang yang lemah yang terbungkam untuk menyuarakan aspirasi kepada pihak yang kuat. Dorongan utama yang melahirkan aksi demonstrasi adalah keinginan akan perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, buruh, rakyat, dan gerakan lainnya dari kelompok kepentingan adalah dalam rangka mewujudkan perubahan. Mahasiswa mempunyai kewajiban intelektual sekaligus moral keagamaan untuk menyampaikan yang benar dan berani menyalahkan apa yang mereka yakini salah (<http://kampus.okezone.com>. diakses 29 Agustus 1012).

Pelabelan “anarki” terhadap aksi demonstrasi mahasiswa sering menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa Kota Padang. Pelabelan anarki terhadap demonstrasi mahasiswa merupakan tindakan yang kurang tepat dan merupakan kesewenang-wenangan kelompok tertentu. Karena tindakan anarki tersebut terjadi bukan hanya karena faktor internal mahasiswa. Tindakan anarki dipicu oleh penyusup yang sengaja disusupkan oleh kelompok tertentu ke dalam demonstrasi mahasiswa agar citra mahasiswa sebagai kelompok intelektual tercemar. Anarkis dalam demonstrasi mahasiswa bisa juga dipicu oleh massa yang cenderung anarki, sehingga mahasiswa terdorong untuk anarki. Anarki dipicu oleh sikap polisi yang kurang bersahabat dalam mengamankan demonstrasi—polisi sering melakukan tindakan agresif baik verbal maupun tindakan fisik seperti, menggentak, mengancam, dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan mematahkan bendera mahasiswa.

Informan dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) mengatakan ketidaksukaan mereka terhadap label anarki pada demonstrasi mahasiswa atau terhadap ungkapan yang menyatakan bahwa “anarki merupakan cara terbaik sebagai penyalur aspirasi”. Bagi mereka, anarki merupakan salah satu cara agar tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi ditanggapi oleh pemerintah. Tetapi hal ini mestinya tidak serta merta memberikan label anarki terhadap demonstrasi mahasiswa. Karena anarki terjadi karena berbagai faktor dan faktor itu tidak hanya bersumber dari mahasiswa, tetapi juga bersumber dari agresivitas polisi, massa yang cenderung anarki, dan penyusup. Anarki merupakan proses terakhir dari segala tahapan demonstrasi. Pada dasarnya anarki tidak akan terjadi bila objek demo (anggota dewan dan pemerintah) menanggapi tuntutan mahasiswa. Ketika objek demo tidak menanggapi tuntutan tersebut, maka cara-cara anarki dilakukan sehingga media meliput. Liputan media merupakan alat yang ampuh menekan objek demo, karena peristiwa ini akan dipublikasi oleh media, publikasi media merupakan alat sosialisasi yang ampuh terhadap masyarakat. Secara tidak langsung dengan dipublikasikan oleh media dengan sendirinya objek demo akan merasa tertekan (Bartes/Wawancara/10 Juli 2012).

Informan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memiliki perspektif sedikit berbeda dari GMNI. Bagi PMII anarki merupakan cara terbaik sebagai penyalur aspirasi di tengah perilaku penguasa yang cenderung “bebal”. Bagi penguasa seperti ini, demonstrasi damai merupakan hiburan yang hanya dijadikan tontonan menarik untuk dilihat bukan untuk ditanggapi. Penguasa seperti ini perlu ditekan dengan tindakan kekerasan, apalagi kalau kekerasan ini dipublikasikan oleh media, media merupakan alat sosialisasi yang ampuh untuk lebih menekan pemerintah dengan dipublikasikannya kebijakan pemerintah yang populis. (Yosep Firman Susilo/Wawancara/05/07/2012).

Anarki dalam demonstrasi mahasiswa pada dasarnya merupakan peringatan terhadap penguasa agar tidak bersikap “masa bodoh” terhadap tuntutan mahasiswa. Tuntutan mahasiswa berisi kritikan terhadap kebijakan penguasa yang tidak konstitusional. Protes mahasiswa terhadap kebijakan penguasa yang tidak amanah merupakan perwujudan dari aktualisasi peran-peran mahasiswa sebagai lokomotif perubahan sosial (agent of change).

Karenanya anarki merupakan salah satu alat protes sosial ketika penguasa sudah bebal dan tidak peduli dengan berbagai kritikan yang diberikan mahasiswa. Karena itu label anarki terhadap demonstrasi mahasiswa di tengah “penguasa bebal” terhadap kritik merupakan pereduksian terhadap eksistensi mahasiswa secara kelembagaan.

Anarki tentu kurang tepat kalau didekti dalam perspektif moral dan etiket. Tetapi mejadi hal yang menarik dan berdasar jika fenomena anarki mahasiswa tersebut dipahami dalam terma protes sosial. Anarki tidak akan menjadi fenomena dalam demonstrasi mahasiswa jika penyelesaian terhadap berbagai persoalan bangsa terselesaikan pemerintah dan wakil rakyat. Ketika keterwakilan suara rakyat di DPR masih buruk, ketika pemerintah masih dirundung oleh masalah ketidakadilan, kemiskinan, dan korupsi masih menggurita sehingga rakyat tidak lagi mempercayai sistem dan struktur yang ada, kebenaran dari pemegang otoritas negeri dianggap hanya sebatas verbalsime, lips servis, alat pencitraan semata yang “absurd”, pada prinsipnya demonstrasi anarki tersebut mengisyaratkan pesan bahwa “saatnya kebenaran itu milik rakyat”. Menyerahkan urusan rakyat kepada wakil mereka di DPR ternyata tidak ubahnya seperti dagelan politik dengan lakon kekuasaan. Ekspektasi rakyat yang menumpuk dan tidak berkesudahan tersebut mulai dilawan dengan pembangkangan sosial (*social disobedience*).

Dalam khazana gerakan sosial, anrki dan “civil disorder” merupakan salah satu bentuk protes sosial sebagai upaya kolektif dalam bentuk perlawanan rakyat (*civil*) terhadap pemegang kekuasaan. Sebagai sebuah paham, anarkisme hadir untuk mereduksi eksistensi penguasa tiran yang tidak bisa melayani warganya atau bahkan justru mengeksploitasi warganya. Bahkan oleh kaum sosialisime libertarian, anarksime dijadikan sebagai gerakan politik menentang segala bentuk otoritarianisme, terutama kekuasaan politik negara dan kekuasaan ekonomi kapitalis serta otoritas menindas lainnya terhadap individu (<http://hukum.kompasiana.com>. diakses 29 Agustus 2012).

3. Faktor-faktor Pendorong Demonstrasi Anarkis

Fenomena anarki dalam demonstrasi mahasiswa tidak terjadi melalui faktor tunggal, akan tetapi di kelilingi oleh varabel yang kompleks. Akumulasi dari beragam faktor tersebut akhirnya melahirkan fenomena anarki. Anarki bisa muncul dari faktor internal mahasiswa, juga bisa muncul dari faktor eksrenal mahasiswa. Faktor internal terkait dengan demonstrasi anarki merupakan bagian dari rancangan demonstrasi itu sendiri seperti aksi damai, semi *chaos*, dan berakhir dengan *chaos*. Tingkatan demonstrasi ini sangat bergantung pada situasi lapangan dan target demonstrasi yang dilakukan. Aksi damai dilakukan ketika objek demonstrasi memberikan tanggapan positif terhadap target demonstrasi yang dilakukan—ketika mahasiswa menginginkan dialog dengan pejabat publik seperti gubernur, anggota dewan dan lainnya ditanggapi, maka aksi demonstrasi hanya sampai pada tahap pertama yakni aksi damai. Level demonstrasi akan meningkat ke level kedua, “semi chaos” dan ketiga “chaos” manakala target demonstrasi tidak meresponi sama sekali tuntutan mahasiswa seperti objek demo tidak mau berdialog dengan segala macam alasan. Keengganan pejabat untuk memenuhi tuntutan mahasiswa ini diperkuat pula dengan lapisan pengaman demonstrasi yang berasal dari polisi dan Satpol PP (Polisi Pamong Praja) yang membentengi “singgasana” pejabat dimaksud, sehingga muncul anggapan dari kalangan mahasiswa bahwa polisi berperan sebagai pengaman kekuasaan bukan pengaman aksi demonstrasi. Faktor internal ini juga didorong oleh faktor-faktor internal lainnya seperti kejengkelan kalangan mahasiswa terhadap kinerja pejabat terkait pengelolaan negara-- pejabat negara tidak amanah, tidak memihak pada kepentingan rakyat mengemuka dalam persoalan ini.

Faktor eksternal pemicu anarki dalam demonstrasi mahasiswa tercipta dalam bentuk agresifitas polisi dan pengaman demonstrasi lain terhadap demonstran, penyusup yang berasal dari luar anggota “korlap” demonstrasi mahasiswa, dan massa yang cenderung anarkis setelah diprovokasi.

Dari hasil diskusi dan penyebaran angket terhadap lembaga kemahasiswaan ekstra kampus dan intra kampus seperti penyebaran angket dan diskusi dengan pimpinan, ketua korlap, dan mahasiswa yang ikut demonstrasi pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),

Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), dan beberapa peserta demonstrasi dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang mengemukakan faktor-faktor dominan pemicu anarki dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Faktor-faktor tersebut adalah; *Pertama*, anarki merupakan salah satu cara terbaik dalam menyalurkan aspirasi mengingat aksi damai tidak digubris oleh pemerintah, faktor ini 18 % dari pilihan responden; *kedua*, anarki dalam aksi demonstrasi mahasiswa dipicu oleh agresifitas aparat keamanan (Polisi dan Satpol PP) dalam pengamanan aksi demonstrasi, faktor ini 10 % dari pilihan responden; *ketiga*, anarkis dipicu oleh penyusup yang berada di luar mahasiswa yang berperan sebagai provokator anarki, faktor ini 35 % dari pilihan responden; *keempat*, anarki dalam aksi demonstrasi mahasiswa dipicu oleh kejengkelan mahasiswa terhadap pemerintah, faktor ini 13,3 %; *kelima*, anarki disebabkan oleh mahasiswa kurang konsep tentang teknik demonstrasi, faktor ini 13,3 % dari pilihan responden; *keenam*, anarki dipicu oleh massa yang cenderung anarki, faktor ini 5 % dari pilihan responden; *ketujuh*, anarki didorong oleh pemahaman keagamaan yang membolehkan makar terhadap pemerintah yang zalim, faktor ini 5 % dari pilihan responden.

3.1. Anarki Salah Cara Terbaik dalam Menyalurkan Aspirasi

Ketika seorang pengamat menggunakan terma etika dan moral dalam mendekati aksi anarki dalam demonstrasi mahasiswa maka paradigma yang terbangun adalah anarki merupakan perilaku sosial menyimpang (social deviation) sehingga berkembanglah cap tidak damai, tidak ramah, urakan dan tidak terpelajar seperti yang dilabelkan pada sebagian besar mahasiswa Makasar. Akan tetapi fenomena anarki ini akan sangat menarik bila didekati dengan terma-terma portes sosial. Dalam paradigma ini, anarki tidak akan menjadi fenomena menarik dalam aksi demonstrasi mahasiswa jika saja penyelesaian berbagai persoalan bangsa terlaksana dengan baik oleh pemerintah dan wakil rakyat. Jika keterbukaan pemerintah dan wakil rakyat terhadap kritik dan pengelolaan negara terlaksana, maka anarki mungkin tidak akan menjadi fenomena menarik sebagai alat penyaluran aspirasi dan “pressure” politik.

Dalam perspektif aktivis mahasiswa Kota Padang baik dengan latar organisasi berbasis agama maupun tidak, tindakan anarki dalam demonstrasi bukanlah tindakan yang sembrono, akan tetapi telah mengalami olah pikir yang matang. Anarki dalam demonstrasi didasarkan pertimbangan sosio-politik tertentu. Ketika aksi damai misalnya telah menjadi bahan lelucon dan hiburan pemerintah, maka anarki menjadi cara yang terbaik sebagai alat protes sosial. Terkait dengan hal ini informan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengatakan, pemerintah sekarang sudah tidak lagi hirau dan tanggap terhadap demonstrasi damai. Seolah-olah bagi pemerintah aksi tersebut lelucon dan hiburan yang wajib ditonton, tidak wajib disikapi. Akan tetapi kalau anarki, pemerintah takut karena akan diliput oleh media. Dengan diliput oleh media, berarti isu demonstrasi yang pada dasarnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak populis seperti isu kenaikan BBM akan terekspos ke media dan akan diketahui masyarakat banyak. Ketika isu ini terekspos media dan diketahui masyarakat, persolannya tidak sederhana, ini akan menimbulkan ketidksimpatisan masyarakat pada pemerintah, dan ini ditakuti pemerintah (Yosep Feiman Susilo Dkk/ Wawancara/05/06/2012).

Dari hasil diskusi di sekretariat PMKRI pada hari Kamis 28 Juni 2012, PMKRI sepakat untuk mengatakan bahwa anarki merupakan salah satu cara terbaik dalam menyalurkan aspirasi dalam aksi demonstrasi dengan argumentasi bahwa ketika pemerintah dan wakil rakyat sudah bebal sehingga tidak ada cara lain selain dengan kekerasan. Tujuannya adalah untuk menekan pemerintah agar mengabdikan tuntutan mahasiswa. Anarki yang lazim diistilahkan dengan “chaos” dalam demonstrasi terjadi melalui tahap-tahap seperti: *pertama*, demonstrasi diawali dengan aksi damai. Ketika pejabat yang menjadi objek demonstrasi tidak mengubris tuntutan mahasiswa, *ditunggu* selama lebih kurang 30 menit. Dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak juga ada respon, aksi demonstrasi sedikit dirancang untuk semi “chaos” seperti membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi dan hati nurani. “Chaos” merupakan jalan terakhir dalam tahapan demonstrasi ketika pejabat yang didemo mamang tidak menunjukkan respon sama sekali terhadap tuntutan mahasiswa. Pejabat memiliki dalih camam-macam untuk tidak

mau meresponi tuntutan mahasiswa atau mengelak bertemu dengan mahasiswa seperti pejabat sedang berada di luar kota, pada hal mereka ada di tempat (Nanik Rahayu Dkk/Wawancara/28/06/2012).

Dalam pendekatan yang lain, informan dari GMNI mengungkapkan, anarki lebih banyak dilihat dari target demonstrasi yang dirancang oleh mahasiswa. Sebelum melakukan aksi demonstrasi mahasiswa biasanya terlebih dahulu menentukan isu yang akan diangkat dalam aksi demonstrasi seperti isu kenaikan BBM, seberapa penting isu ini diangkat, dan bagaimana target tuntutan dalam isu ini. Target tuntutan tersebut seperti orasi tentang kenaikan harga BMM di depan gedung DPRD, atau dialog dengan gubernur terkait dengan solusi terbaik terhadap isu yang diangkat. Ketika target-target tersebut bisa dicapai dengan aksi damai, maka anarki tidak perlu dilakukan, “meski saya tidak suka dengan istilah anarki, tapi bentrokan”. Karenanya anarki bagi GMNI bukan merupakan cara terbaik dalam menyelurkan aspirasi dalam aksi demonstrasi, akan tetapi merupakan salah satu cara terbaik dalam kondisi-kondisi tertentu.

Sebelum sampai kepada anarki, demonstrasi dilaksanakan dengan damai. Aksi damai dilakukan dengan cara “long march” dan orasi. Ketika ini tercapai--mahasiswa melakukan “long march” tidak dihalangi oleh polisi dan Satpol PP, maka mahasiswa tidak perlu mengontak media agar aksinya diekspos dan demonstrasi tidak perlu anarki. Akan tetapi ketika “long march” dan orasi tidak diizinkan dan tidak ditanggapi oleh objek demo, maka mahasiswa mengontak media agar melakukan publikasi. Publikasi bagi GMIN bukan untuk mempresur objek demo, akan tetapi agar masyarakat tahu bahwa ada isu yang sedang diperjuangkan mahasiswa terkait dengan persolan mereka. Dengan tereksposnya isu tersebut di media, maka borok pejabat tersebut akan diketahui oleh masyarakat. Persoalan apakah dengan tereksposnya isu yang diangkat ke media membawa kegamaangan tersendiri bagi objek demo, itu persoalan lain. Ketika target demonstrasi mesti terpenuhinya tuntutan bertemu dengan gubernur atau berdialog langsung dengan wakil rakyat dihalangi oleh Polisi, meski telah minta izin dengan bahasa yang berbudaya misalnya “gedung rakyat ini rumah rakyat termasuk rumah mahasiswa, kenapa kami yang nota benenya rakyat tidak boleh masuk, kami punya tujuan yang mulia bertemu dengan wakil kami yakni agar aspirasi kami didengar”, tetapi polisi menghalangi. Selah-olah polisi telah menjadi pengaman penguasa, ketika itu mahasiswa kecewa dengan tindakan polisi, dan agar target demo tercapai, mahasiswa memaksa masuk dengan menerobos barisan polisi, maka terjadilah bentrokan. Bentrokan inilah yang lazim dipublis media dengan sebutan anarki. Pada dasarnya persolan ini tidak bisa dilabeli anarki, sebab anarki tersebut bersumber dari ideologi anarkisme. Paham yang mengajarkan kekerasan dalam mencapai tujuan dan itu menjadi pandangan hidup. Mahasiswa, terutama GMNI tidak menganut paham tersebut (Bartes Dkk, Wawancara/10 Juli 2012).

Informan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengatakan, anarki dalam demonstrasi terjadi karena kejengkelan mahasiswa terhadap lembaga yang dianggap mampu berperan sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, misalnya dalam kasus kenaikan harga BBM. Ketika mahasiswa akan menyampaikan aspirasi kepada gubernur atau ketua DPRD agar BBM tidak dinaikan mengingat korbanya masyarakat kecil, pejabat yang bersangkutan tidak mau menemui mahasiswa, pada hal yang bersangkutan ada di tempat. Seharusnya para pejabat negara tersebut dengan kerelaan hati bersedia menemui mahasiswa karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang mereka wakili. Hal ini sering memicu anarki, agar tuntutan dipenuhi (Sukri, Wawancara/03/03/2012).

Informan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengatakan terkait dengan pembakaran atau pengrusakan terhadap fasilitas negara oleh mahasiswa dalam pelaksanaan demonstrasi seperti pembakaran pos polisi sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012 di mana pos polisi depan hotel Basko Padang dihancurkan, lebih disebabkan oleh sikap tidak simpatik mahasiswa terhadap sikap-sikap polisi. Terkait dengan kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah, bagi mahasiswa sikap tersebut merupakan bentuk dari ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat yang belum tersejahterkan oleh mereka (Doly, Ketua IMM Kota Padang, wawancara 03/03/2012).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa anarki yang terjadi dalam demonstrasi mahasiswa pada prinsipnya merupakan tindakan yang telah mengalami rasionalisasi. Anarki bukanlah tindakan menyimpang dari norma-norma sosial sehingga dengan mudah dicap urakan, barbar, akan tetapi merupakan tindakan yang telah mengalami pilihan-pilihan rasional, karenanya pendekatan etika dan moral kurang tepat digunakan sebagai alat analisa. Pendekatan gerkan sosial, terutama protes sosial untuk menentang otoritarianisme dan sikap “bebal” penguasa terhadap segala macam kritik lebih tepat digunakan.

Dalam terma protes sosial, anarki tidak akan menjadi fenomena dalam demonstrasi mahasiswa jika saja respon dan penyelesaian terhadap berbagai persoalan bangsa berujung dan terselasaikan oleh pemerintah dan wakil rakyat. Anarki terkait dengan nagara yang dirundung masalah ketidakadilan, kemiskinan, dan korupsi. Anarki terkait dengan kondisi bangsa yang sedang sakit. Sakit secara ekonomi yang ditandai dengan sistem ekonmi yang tidak pro rakyat akan tetapi berpihak pada elit ekonomi tertentu atau pemodal asing. Demikian juga penegakan hukum yang spasial dan peradilan yang terjangkit sel mafia peradilan atau “judicial corruption”. Hukum yang dirasakan oleh rakyat masih dalam wujud hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Vonis koruptor yang lebih ringan daripada pencuri buah atau merica. Berbagai mega skandal bukannya berakhir di meja hijau tetapi ditransaksikan di meja kekuasaan dan parlemen.

Ekspresi anarki tersebut merupakan fenomena puncak gunung es dari krisis kepercayaan rakyat terhadap hukum dan peradilan. Krisis kepercayaan muncul manakala ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi pada pemerintah tidak dibalas dan ditangani dengan baik oleh pemerintah sehingga rakyat tidak lagi mempercayai sistem dan struktur yang ada. Kebenaran dari pemegang otoritas pada akhirnya dianggap hanya sebatas verbalisme, lips servis, dan alat pencitraan semata yang “absurd”. (<http://hukum.compasiana.com>. Diakses 29 Agustus 20012)

Hasse J (2012: 63) mengatakan, anarki dalam demonstrasi dinilai mahasiswa efektif dibandingkan cara-cara lain agar didengar oleh pemerintah, kemudian dengan diliput media gaung demonstrasi akan terdengar dimana-mana.

3.2. Anarkis Dipicu oleh Agresivitas Aparat

Demonstrasi menghadapi dua kelompok sosial yang berbeda yakni aparat keamanan (polisi) dan mahasiswa kepada dua kepentingan yang berbeda. Polisi punya kepentingan menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik negara. Pada sisi lain mahasiswa punya kepentingan menyampaikan aspirasi mereka secara bebas tanpa terhalang siapapun termasuk polisi. Ketika dua kepentingan ini bertemu sering menimbulkan konflik akibat dari adanya perbenturan kepentingan. Tindakan kekerasan yang muncul dalam aksi demonstrasi yang bersumber dari polisi lebih berbentuk agresivitas.

Agresivitas bisa didefinisikan sebagai usaha sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Tingkah laku agresif merupakan bentuk tingkah laku yang merugikan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis pada orang lain dan merusak benda-benda atau objek. Dalam demonstrasi agresivitas polisi bisa terjadi dalam dua bentuk yakni verbal dan fisik.

Informan dari IMM mengatakan, aksi anarki bisa dipicu oleh tindakan polisi atau Satpol PP yang kurang bersahabat baik verbal maupun fisik. Omongan aparat keamanan sering mamancing emosi mahasiswa sehingga terdorong melakukan tindakan anarki. Omongan-omongan tersebut diantaranya “kamu mahasiswa, tempat kamu bukan disini (kantor Gubernur gedung DPRD), tempat kamu di kampus, belajar dengan baik sehingga dapat nilai baik”. Sindiran dan gertakan juga sering dilakukan oleh aparat keamanan sehingga memancing mahasiswa untuk

bertindak anarki. Tindakan fisik yang dilakukan aparat keamanan yang memicu anarki adalah dorongan terhadap mahasiswa ketika mahasiswa ingin masuk ke ruang DPR atau kantor Gubernur. Dorongan tersebut dibalas oleh mahasiswa sehingga terjadi aksi dorong-dorongan. Ini merupakan awal terjadinya bentrokan (Alfred/Wawancara/05/07/2012).

Sebagai tambahan dari hal di atas, tindakan agresif polisi dalam mengamankan demonstrasi bisa berupa mematahkan atribut yang dibawa oleh mahasiswa ketika melaksanakan demonstrasi seperti mematahkan bendera. Aksi fisik lainnya seperti membawa anjing untuk menghadang mahasiswa. Pada demonstrasi kenaikan BBM, polisi menghadang mahasiswa dengan anjing, di hadapan mahasiswa tali anjing polisi tersebut dipanjangkan sehingga menggigit mahasiswa sebagaimana dialami mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Tindakan polisi mengretak mahasiswa, mematahkan bendera mahasiswa, bahkan memanjangkan tali anjing sehingga anjing tersebut menggigit mahasiswa merupakan tindakan agresif polisi yang sangat memancing mahasiswa untuk bertindak anarki sebagai bentuk perlawanan. (Syamsuriadi, Wawancara/27/06/2012).

Sikap aparat keamanan yang terlalu agresif seperti dalam kasus demonstrasi mahasiswa ketika kenaikan BBM, di samping telah merendahkan harkat dan martabat mahasiswa dengan ucapan dan tindakan mereka juga membahayakan fisik mahasiswa. Menghadang mahasiswa dengan anjing bagi aktivis GMNI merupakan tindakan yang merendahkan martabat mahasiswa. Mahasiswa kelompok masyarakat terpelajar, mestinya dihadapi juga dengan sikap polisi yang berbudaya bukan dengan anjing dan kata-kata kasar. Ungkapan seperti “aa nan kalamak dek ang” bukanlah kata-kata berbudaya dari polisi. Dalam demonstrasi kenaikan harga BBM, hanya satu tujuan mahasiswa yakni ingin masuk rumah mereka sendiri, rumah rakyat, mahasiswa bagian dari rakyat, di gedung DPR tinggal rakyat melalui wakil-wakil mereka. Tujuan mahasiswa memasuki rumahnya ingin menemui wakilnya, ingin beraudiensi dengan mereka tentang kebijakan pemerintah yang mahasiswa anggap tidak memihak kepada rakyat—kebijakan yang sangat merugikan masyarakat kecil. Tidak pantas polisi menghadang mahasiswa memasuki rumahnya sendiri dengan hadangan anjing, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang ingin memasuki rumahnya sendiri yakni gedung DPRD. Dalam aksi dorongan-dorongan dengan mahasiswa, anarki polisi bisa berupa pukulan dengan kepala tangan (tinju) terhadap mahasiswa. Tendangan kaki polisi juga terjadi ketika aksi dorong-dorongan tersebut, mematahkan bendera dan lainnya.

Sikap agresif polisi ini sangat terlihat ketika waktu yang ditentukan untuk demonstrasi telah habis, sementara mahasiswa belum mau membubarkan diri. Polisi dengan garis komando melalui atasan mereka menuntut agar aksi demonstrasi harus bubar dalam waktu yang telah ditentukan bagaimanapun caranya, sementara mahasiswa dikarenakan target demonstrasi belum tercapai, mereka belum mau membubarkan diri. Pertarungan dua kepentingan ini yang akhirnya menimbulkan anarki. Polisi tidak boleh tidak harus membubarkan aksi demonstrasi sesuai dengan tuntutan atasan mereka, sehingga kadangkala kekerasan juga bisa jadi pilhan (Nurul Hidayati Dkk, Wawancara/10/06/2012).

Tanggapan terhadap agresivitas Polisi oleh mahasiswa juga dipicu oleh sikap keseharian Polisi yang kurang memberikan teladan kepada masyarakat. Misalnya saja polisi Lalulintas yang sering menilang kendaraan tanpa mempertimbangkan sejauhmana kesalahan pengguna jalan raya atau pengendara dimaksud. Setiap berhubungan dengan polisi ujung-ujungnya duit. Kendaraan mahasiswa tidak terlapas jadi objek polisi seperti ini. Sikap-sikap polisi dalam kehidupan keseharian masyarakat ini sering terbawa-bawa dalam demonstrasi, terutama ketika mahasiswa saling berhadapan dengan polisi. Ketika Polisi agresif mahasiswa balik balas agresif, ditambah lagi dengan telah terbangun pandangan negatif terhadap sikap keseharian polisi (Febriki Dkk, Wawancara 27/06/2012).

Terkait dengan hal ini, bermanfaat kiranya kalau telusuri secara mendalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Supardi Dkk (dalam isjd.pdii.lipi.go.id. diakses tanggal 7 April 2012) dengan judul “ Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian yang Menangani Demonstrasi”. Dalam menangani aksi demonstrasi polisi sering melakukan tindakan agresif baik verbal maupun fisik. Dalam teori tentang agresivitas, tindakan agresif verbal dilakukan dalam

bentuk meledek, menghina, mengancam dengan perkataan, intimidasi atau ancaman dengan kekerasan, memaki dan pemberian nama ejekan. Dan secara fisik terlaksana dalam bentuk memukul, menendang, mendorong, menjambak dan menonjok, mencubit, menjegal/menyengkat, meludahi, menggigit, merusak dan mengambil paksa barang orang lain. Dalam bertugas menangani aksi demonstrasi polisi dilengkapi dengan tongkat dan tameng, Polisi menggunakan tongkat tersebut untuk memukul demonstran pada saat menjaga demonstrasi. Tongkat tersebut mempengaruhi polisi untuk melakukan tindakan agresi karena tongkat tersebut merupakan salah satu petunjuk agresi.

3.3. Anarkis Dipicu oleh Penyusup

Secara bahasa “penyusup” bermakna orang yang menyusup atau masuk secara diam-diam. Penyusup merupakan kata benda dengan kata kerja “menyusup” dengan makna menyuruk atau masuk ke bawah atau ke dalam sesuatu. Makna lain dari menyusup adalah merembes ke daerah musuh. Penyusup adalah orang yang melakukan tindakan penyusupan (Poerwadarminta, 1986:983).

Terkait dengan demonstrasi penyusup adalah orang di luar demonstran atau mahasiswa yang melakukan demonstrasi yang masuk ke dalam kelompok demonstran. Biasanya penyusup berperilaku layaknya demonstran atau kalau yang melakukan aksi demonstrasi adalah mahasiswa mereka berperilaku layaknya mahasiswa, mereka mengatasnamakan mahasiswa saat anarki terjadi dalam demonstrasi (www.republika.co.id. Diakses 2 september 2012).

Perilaku penyusup seperti layaknya demonstran, terutama mahasiswa. Penyusup tentu punya kepentingan tertentu sesuai dengan kepentingan kelompok penyusup tersebut. Kepentingan tersebut beragam sesuai dengan isu demonstrasi apa yang mereka susupi. Ketika penyusup masuk ke dalam lingkungan demonstran mereka berusaha melakukan provokasi sehingga masa tidak terkendali dan terjadi “chaos”. Biasanya target penyusup tersebut adalah mengacaukan aksi demonstrasi yang telah dirancang sedemikian rupa. Tidak jarang dari penyusup memprovokasi mahasiswa untuk bertindak emosional sehingga terpancing untuk melakukan aksi-aksi anarki. Sulit mengidentifikasi penyusup dalam aksi demonstrasi, meskipun begitu dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, penyusup tentu tidak memiliki kekhasan atau atribut sebagaimana dimiliki mahasiswa.

Informan dari IMM mengungkapkan, biasanya penyusup mudah dikenali oleh mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi karena setiap anggota korlap memiliki atribut tersendiri dan biasanya penyusup tidak memiliki atribut tersebut. Misalnya ketika demonstrasi kenaikan harga BBM, IMM menggunakan “corong minyak tanah” (saluran untuk memasukan minyak tanah ke dalam wadah seperti jerigen) sebagai atribut, corong minyak tanah itu ditelungkupkan sebagai simbol dari mahal dan sulitnya menemukan BBM. Biasanya penyusup tidak memiliki simbol itu sehingga mudah dikenali oleh anggota korlap. Masing-masing anggota korlab saling mengenal, ketua korlab sangat tahu dengan anggotanya. Adapun tugas dari penyusup ini adalah melakukan provokasi terhadap demonstran, penyusup lihai mencari mangsanya yang mudah terprovokasi atau terpancing emosinya. Penyusup sangat pintar menghasut melalui kata-kata seperti “kalau tidak anarki aksi demonstrasi tidak akan didengar oleh pemerintah”. Mendengar ungkapan yang bernada provokasi itu demonstran yang emosional apalagi telah berhadapan dengan polisi dalam waktu yang cukup lama akan terprovokasi untuk bertindak anarki (Doly, Wawancara/10/07/2012).

Informan dari dewan mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengungkapkan, kehadiran penyusup tidak hanya melakukan provokasi masa dengan bahasa yang menghasut, penyusup juga mengiringi hasutannya dengan melakukan tindakan anarki seperti melempar dari belakang dengan menggunakan batu atau botol minuman sehingga terkena polisi. Polisi menyangka yang melempar adalah mahasiswa karena lemparan tersebut dari arah mahasiswa, maka polisi menggunakan alat pengamannya seperti tongkat untuk membalas lemparan

tersebut. Sudah tentu yang terkena pentungan adalah mahasiswa yang berada barisan terdepan. Setelah itu aksi anarki berkembang dan meluas, akhirnya diikuti oleh massa (Adrian, Wawancara/11/06/2012).

Penyusup sangat mengerti psikologi masa ketika melakukan provokasi, ketika demonstran dalam kondisi yang tidak diuntungkan—gerah karena tidak juga diizinkan untuk masuk ke dalam gedung DPRD setelah menunggu sangat lama karena dihadang oleh Polisi, gerah karena cuaca sangat panas sehingga menimbulkan kondisi fisik yang tidak menguntungkan. Penyusup biasanya melakukan aksinya ketika demonstrasi melibatkan masa yang lebih besar dengan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti pada demo kenaikan harga BBM. Dalam demonstrasi yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa tetapi melibatkan berbagai lapisan masyarakat sulit untuk mengidentifikasi penyusup. Pengenalan terhadap penyusup hanya bisa dilihat dari tidak adanya atribut yang dimilikinya. Setiap anggota korlap dalam aksi demonstrasi memiliki atribut khusus seperti pita dan lain-lain (Bartes, Wawancara/10/07/2012). Dalam berbagai demonstrasi, penyusup sering diperankan oleh orang yang sama. Ketika mengikuti satu aksi demonstrasi penyusup yang melakukan provokasi ditemukan juga pada aksi demonstrasi lain, ada yang mengatakan penyusup tersebut dari kalangan kepolisian meski hal ini sulit dibuktikan (Doly, Wawancara/03/07/2012).

Ketika masa telah terpropokasi oleh penyusup dengan cara melepar, maka mahasiswa yang melaksanakan aksi demonstrasi juga terpancing untuk ikut melakukan aksi anarkis. Ketika masa termasuk mahasiswa telah terpropokasi untuk melakukan tindakan anarki, maka rencana demo yang telah dirancang sedemikian rupakan tidak bisa diwujudkan. Ketua koordinator lapangan (korlap) tidak mampu mengendalikan anggota korlapnya, ketika itu tindakan maksimal yang mampu dilakukan ketua “korlap” dalam rangka agar anggota “korlap” tidak terlibat lebih jauh dalam aksi anarki adalah menarik anggota mereka dari arena demonstrasi atau kalau pada mulanya korlapnya berada di barisan terdepan, untuk menghindari anarki di tarik ke barisan yang paling belakang. Kalau masih berada di depan akan menjadi sasaran anarkinya Polisi. Ini yang dilakukan ketua Koordinator lapangan Dewan Mahasiswa (Dema) IAIN ketika ikut dalam aksi demonstrasi kenaikan harga BBM untuk menghindari mahasiswa yang ikut dalam aksi demonstrasi tidak terlibat lebih jauh dalam aksi anarki (Adrian, Wawancara/11/06/2012).

Dalam versi yang sedikit berbeda dari sebelumnya infoman dari GMNI mengungkapkan, biasanya massa yang mudah terpropokasi tersebut adalah masa mengambang. Biasanya massa mengambang itu berasal dari organisasi mahasiswa intra kampus yang peserta demonstrasinya diperoleh dengan cara menutup pintu gerbang kampus, lalu mahasiswa digiring dan dipaksa untuk mengikuti aksi demonstrasi. Massa mengambang ini tidak punya pengetahuan tentang isu atau kebijakan pemerintah yang membutuhkan demonstrasi. Mahasiswa dari organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti GMNI dan lainnya sebelum mengikuti aksi demonstrasi mengalami berbagai proses persiapan aksi terlebih dahulu seperti mengumpulkan data dan informasi tentang isu yang membutuhkan demonstrasi. Setelah data dan informasi dikumpulkan, data dan informasi tersebut diolah dengan cara mendiskusikannya dengan kelompok yang dianggap kompeten baik dari dalam organisasi maupun yang di luar. Diskusi ini dilakukan dalam rangka mencari tawaran-tawaran terbaik untuk dijadikan solusi terhadap kebijakan pemerintah yang didemo. Setelah didiskusikan dan ditemukan solusi dilakukan teknik lapangan yang melibatkan koordinator lapangan. Kalau demonstrasi dilakukan dalam bentuk aliansi seperti GMNI merupakan bagian aliansi Cipayung biasanya teknik lapangan (Teklap) diikuti oleh korlap Cipayung. Setelah teklay dilakukan, dilakukan juga internalisasi. Internalisasi merupakan proses pemberian pemahaman kepada anggota korlap yang akan ikut dalam demonstrasi tentang isu yang butuh demonstrasi dan bagai teknik dalam mengikuti jalannya aksi demonstrasi. Berdasarkan proses-proses ini, masa mengambang seperti ini jarang ditemui dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus (Bartes, Wawancara/10/06/2012).

Dalam aksi demonstrasi, semua subjek yang terlibat dalam aksi demonstrasi baik demonstran maupun polisi cenderung terprovokasi pada saat demonstrasi mulai rusuh, subjek akan bertindak agresif seperti memukul karena terprovokasi oleh teman-temannya. Myers (dalam Koeswara, 1988) sebagaimana diikuti oleh Agus Supardi Dkk (dalam isjd.pdii.lipi.gi.id. diases 7 April 2012) mengatakan, provokasi dapat mencetuskan agresi, karena

provokasi itu oleh pelaku agresi dianggap sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan respon agresi pula untuk meniadakan bahaya yang diisyaratkan oleh ancaman itu.

3.4. Anarki Dipicu Kejengkelan Mahasiswa Terhadap Pemerintah

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemerintah mempunyai tiga makna yakni: 1) kekuasaan memerintah suatu negara, 2) badan yang tertinggi yang memerintah dalam suatu negara 3) negara atau negeri, 4) pengurus atau pengelola. Sementara “pemerintahan” merupakan cara, hal, urusan memerintah (Poerdarminta, 1986: 740).

Pemerintah merupakan terjemahan dari kata “government” yang bermakna: 1) sejumlah orang yang berwenang untuk mengambil keputusan atas nama masyarakat, 2) pengelolaan, pengarahan dan pengendalian urusan umum dari satu unit politik (pemerintah) (Soekanto, 1983: 130).

Wahyu (1986) mengatakan, dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, pemerintah dituntut oleh undang-undang negara agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai dengan tuntunan undang-undang. Dalam konteks negara Indonesia pemerintah dituntut untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang dasar negara. Di antara undang-undang negara yang berisikan hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh pemerintah adalah: 1) Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “negara melalui pemerintah berkewajiban menyediakan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi rakyatnya”, 2) Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “negara melalui pemerintah harus mewujudkan penyediaan pendidikan dan pengajaran pada rakyatnya”, 3) Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “negara melalui pemerintah harus mewujudkan kesamaan hak warga negara di hadapan hukum”. Pasal yang sangat krusial yang sering menjadi isu hangat dalam setiap demonstrasi mahasiswa adalah Pasal 33 yang berbunyi “bumi dengan segala isinya dikelola oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat”.

Dalam proses perjalanan pemerintahan, sering amanah konstitusi tersebut tidak sempurna dijalankan oleh pemerintah sebagai pengelola pemerintahan sehingga menimbulkan gejala dalam masyarakat. Dalam konteks ini demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada dasarnya dalam rangka melakukan kontrol dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari amanah konstitusi.

Kejengkelan mahasiswa terhadap pemerintah pada dasarnya terkait dengan kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan amanah undang-undang dasar 1945 yang dalam perspektif mahasiswa belum lagi amanah. Tidak terciptanya kesejahteraan rakyat, tidak terangkatnya supremasi hukum, birokrasi yang korup, kemiskinan, kebijakan yang tidak memihak pada rakyat kecil, merupakan isu-isu yang banyak disorot mahasiswa dalam demonstrasi yang mereka lakukan.

Terkait persoalan di atas informan dari PMKRI mengatakan, kejengkelan mahasiswa terhadap pemerintah lebih banyak terkait dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya. Banyak kasus-kasus korupsi yang tidak tuntas diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 19945 Pasal 33 punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Dalam kenyataannya banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin (Michael, Wawancara, 28/06/2012).

Bagi PMII pada saat ini telah terjadi krisis keteladanan di kalangan pejabat, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Sehingga tidak ada dari mereka yang bisa dicontoh. Kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) bukan lagi perilaku yang dianggap menyimpang di kedua lembaga ini. Sehingga kedua lembaga ini tidak lagi bisa dijadikan panutan. Pada diskusi yang dilaksanakan di sekretariat PMII, muncul pandangan segelintir rekan-rekan di PMII untuk melakukan revolusi. Dengan adanya revolusi, berarti semua orang atau pejabat yang ada di kedua lembaga ini dengan serta merta harus diganti dengan orang-orang yang punya integritas moral. Ketika penulis menanyakan pola pemerintahan apa yang cocok sebagai pengganti pemerintahan yang telah mengalami krisis

keteladan ini, sebagian peserta diskusi menyarankan perlunya untuk didiskusikan sitem khilafah yang tengah dirancang dan diperjuangkan oleh rekan Hisbut Tahrir Inonesia (HTI) (Defrizal Dkk, Wawancara/27/06/2012).

Di samping jengkel pada pemerintah, mahasiswa juga jengkel pada anggota DPRD yang tidak aspiratif. Anggota dewan seharusnya menjalankan peraan mereka sebagai wakil dari rakyat sehingga apapun keluhan rakyat terkait dengan kinerja pemerintah mesti mereka suarkan. Akan tetapi dalam setiap audiensi dengan anggota dewan, kesepakatan audiesni tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, kesepakatan tinggal kesepakatan (Doly, Wawancara 05/07/2012).

Rejendra Singh (2010: 36) menegaskan, gerakan sosial akan selalu ada manakala ketidakadilan dan ketimpangan sosial terkait dengan martabat manusia. Dalam proses mobilisasi, gerakan sosial bisa menjadi syarat dengan kekerasan yang mengekspresikan adanya elemen-elemen “riot” dan “rebellion”.

3.5. Agama dalam Terma Demonstrasi Anarki

Dalam terma sosiologi, agama merupakan seperangkat nilai yang bersumber dari kekuatan supranatural yang digunakan sebagai cetak biru berperilaku bagi penganutnya. Sama halnya dengan nailai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai agama juga berperan sebagai motivator dalam tindakan sosial dalam segala aspeknya. Dalam hal ini agama dengan dengan segala ide-ide yang dimilikinya sangat berperan dalam peningkatan perubahan sosial (Johnson, 1986: 237).

Fungsi transformasi yang diperankan oleh agama dalam setiap keberadaan nabi-nabinya telah mampu merubah kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai lama yang di milikinya kepada nilai-nilai baru yang dibawa oleh agama. Keberadaan nabi dengan nilai-nilai agama yang di bawanya telah mampu menobrak struktur masyarakat yang menindas kepada yang lebih menghormati harkat dan martabat masyarakat itu sendiri. Keberadaan nabi Muhammad dengan risalah Islam misalnya telah mampu merubah struktur masyarakat Qurais dari tidak menghormati harkat dan martabat perempuan kepada sangat menghormati perempuan. Keberadaan Budha Gautama yang menobrak kukuhnya stratifikasi sosial tertutup. Kemudian kehadiran nabi Musa misalnya telah mampu menobrak kekuasaan otoriter Firaun (Hendropuspito, 1993).

Meski agama berperan sebagai motivator tindakan sosial, dalam kontek aksi demonstrasi anarki nampaknya peran agama tidak begitu memberikan pengaruh. Lembaga-lembaga kemahasiswaan ekstra dan intra kampus tidak begitu menjadikan agama sebagai semangat dalam melakukan aksi. Terma-terma seperti “amar ma’ruf nahi munkar” yang menjadi ideologi gerakan IMM, “tauhid” sebagai nilai dasar pergerakan PMII, moto “pro ecclesia et patria “ “untuk bangsa dan tanah air” sebagai nilai dasar gerakan PMKRI, dan “Islam transformatif” sebagai ideoligi gerakan HMI sepertinya belum lagi menjadi dominan sebagai penyemangat demonstrasi di lapangan. Nilai-nilai agama hanya digunakan ketika mendiskusikan isu yang menjadi topik dalam aksi demonstrasi. Orasi demonstrasi jarang diformat dengan pendekatan keagamaan. Di lapangan nilai-nilai yang banyak diusung adalah nilai-nilai kebangsaan, kebersamaan, dan kepedulian kepada masyarakat tertindas.

Informan dari HMI mengungkapkan, sebagai organisasi yang berideologikan Islam, ke-Islaman hanya digunakan ketika mendiskusikan isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi. Di lapangan yang lebih banyak disemangatkan pada anggota korlap adalah nilai kebangsaan. Nilai-nilai agama seperti boleh makar pada pemerintah yang zalim tidak menjadi topik dalam orasi-orasi dalam aksi-aksi demonstrasi (Yogi Yolanda Dkk, Wawancara/27/06/2012).

Dalam pandangan PMII, ideologi organisasi “Aswaja” (ahlussunnah wal jama’ah) jarang dibawa ketika aksi demonstrasi berlangsung. Dalam aksi-aksi demonstrasi nilai-nilai yang banyak dibawa adalah nilai-nilai kebangsaan—perwujudan nilai-nilai kebangsaan ini adalah ketika pemerintah atau penguasa tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat, PMII memiliki kepentingan untuk meluruskannya, salah satunya dalam bentuk

demonstrasi. Nilai-nilai aliansi Cipayung juga merupakan nilai-nilai yang sering dibawa ketika demonstrasi melibatkan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung. Nilai-nilai Cipayung sangat terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan komitmen kebangsaan (Yosep Firman Susilo Dkk, Wawancara/27/06/2012).

Sebagai orang yang beragama, nilai-nilai agama sebagai alat control sosial terhadap kekuasaan merupakan suatu keharusan. Semua agama pasti punya komitmen tersebut dalam rangka membebaskan masyarakat dari ketertindasan. PMKRI malah punya moto “pro ecclesia et patria” yang bermakna untuk gereja dan tanah air. Berdasarkan moto tersebut pada prinsipnya PMKRI seratus persen Katholik seratus persen Indonesia. PMKRI memiliki komitmen yang tinggi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerenanya melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan yang tidak memihak pada rakyat kecil seperti kasus Pasar Raya Padang dimana pedagang terugikan oleh kebijakan Pemerintah Kota Padang tidak luput dari perhatian PMKRI. Tetapi di lapangan nilai-nilai agama tersebut tidak dibawa yang dibawa adalah nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Cipayung (Sonny Manurung Dkk, Wawancara/27/06/2012).

Sebagai gerakan dakwah IMM mensosialisasikan ideologi IMM sebagai penjabaran nilai-nilai “amar ma’ruf nahi mungkar” tersebut dalam aksi demonstrasi. Religiositas IMM tidak bersimpatik simpatik terhadap kekuasaan yang zalim dan mungkar, dan kekuasaan yang menindas rakyat kecil. Akan tetapi ini merupakan bagian dari dakwah, karenanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh IMM jarang yang anarki (Doly, Wawancara 10/06/2012).

Basori A. Hakim (2010: 60) menegaskan, kekerasan atas nama agama lebih banyak dorong oleh masalah sosial ekonomi, pengabaian terhadap hukum, kebijakan politik yang tidak adil, prasangka, kurang tegasnya hokum.

B. Penutup

Anarki dalam aksi demonstrasi mahasiswa tidak terjadi karena faktor tunggal. Anarki didorong oleh faktor-faktor seperti kejengkelan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah dan anggota dewan, pemerintah sudah bebal karenanya anarki menjadi cara terbaik untuk menekan pemerintah, penyusup sebagai provokator anarki, massa yang cenderung anarki, polisi dan Satpol PP yang agresive, mahasiswa kurang konsep tentang issue dan teknik demonstrasi, dan pemahaman agama yang radikal. Penyelesaian terhadap anarki semestinya lahir dari eksplorasi secara mendalam terhadap multi faktor ini. Yang menarik untuk digali lebih dalam adalah mengapa agama tidak menjadi dominan dalam aksi demonstrasi di kalangan mahasiswa dengan latar belakang organisasi agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akira, Nagazumi (1977): *Masa Awal Pembentukan Perhimpunan mahasiswa Indonesia: Kegiatan Mahasiswa Indonesai di negeri Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesai

Amelia, Septina Rizki dkk (2004): *Perbedaan Agesivitas Antara Mahasiswa yang Pernah Mengikuti Demonstrasi dan Mahasiswa yang Belum Mengikuti Demonstrasi*, Semarang: UNISULLA

Anggili, Ricky, *Peran Gerakan Mahasiswa dalam Perubahan dan Pembangunan*. <http://rickyanggili.blogspot.com>. (diakses tanggal 6 April 2012)

Anarkisme-Kolektif, <http://id.wikipedia.org>. (diakses 29 Agustus 2012)

Aziz, Abdul, *Anarkisme dalam Terma Protes Sosial*. <http://hokum.kompasiana.com>. (diakses 29 Agustus 2012)

Crownia, Eلسya, *Antara Politisi, Rakyat dan Mahasiswa*. <http://padangekspres.co.id>. (diakses tanggal 6 April 2012)

Cegah Penyusup, *Mahasiswa Perlu Perjelas Identitas Saat Berdemo*. www.republika.co.id (diakses 2 September 2012)

Domo BBM, *Bendera Kantor Gubernur di Turunkan*. <http://nasional.vivanwes.com>, (diakses 6 April 2012)

- Demo BBM, Mahasiswa Digigit Anjing Polisi*, <http://vivanews.com>, (diakses 6 April 2012)
- Hendropuspito (1993): *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius
- Ieka, Nila (2009): *Teori Kekerasan*, <http://nilaieka.blogspot.com>, (diakses tanggal 6 April 2012)
- J. Hasse, *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Jurnal Studi Pemerintahan, Februari, 2012, halaman 63
- Mirsel, Robert (2004): *Teori Gerakan Sosial*, Yogyakarta: INSIS Press
- Mas, Marwan (2010): *Ricuh Mahasiswa di Makassar* (dalam Media Indonesia 10 Maret 2010)
- Putra, Eka Widiya dkk (2003): *Gerakan Mahasiswa dan Otoritarianisme (Sketsa Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat tahun 1958-1999)*, Jakarta: Yayasan Citra Pendidikan Indonesia
- Paul Johnson, Doyle (1986): *Sociological Theory Classical Founders and Cotemporary Perspectives*, terj. Robert M. Z. Lawang: Jakarta, Gramedia, 1986)
- Powerwadarminta. W.J.S. (1986): *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ostler, George (1990): *The Little Oxford Dictionary*, Great Britain: The Chaucer Press Ltd
- Singh, Rajendra (2010): *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book
- Supardi, Agus (2007): *Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian yang Menangani Demonstrasi*, Jakarta: Gunadarma
- Wahyu (1986): *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional
- Wulandari, Iva. *Keluatan Aksi Demo Mahasiswa*. <http://kampus.okezone.com>, (diakses, 29 Agustus 2012)
- Zirmansyah (2010): *Mandangan Masyarakat Terhadap Tindakan Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan dengan Tindakan Kekerasan Atas Nama Agama)*, Jakarta: Puslitbang
- Kehidupan Beragama
- Bartes, Ketua GMNI Kota Padang, *Wawancara*, 10 Juli 2012
- Yosep Firman Susilo, Ketua PMII Kota Padang, *Wawancara*, 5 Juli 2012
- Nanik Rahayu, Sekjen/orator PMKRI Kota padang, *Wawancara*, 28 Juni 2012
- Sukri, Ketua Koordinator Lapangan Demonstrasi HMI Cabang padang, *Wawancara*, 3 Maret 2012
- Doly, Ketua IMM Kota Padang, *Wawancara* 3 Maret 2012
- Alfred, Kepala Komonikasi IMM Kota Padang, *Wawancara*, 5 Juli 2012
- Syamsuriadi, Aktivist Demonstrasi PMII Kota Padang, *Wawancara*, 27 Juni 2012
- Febriki, Aktivist Demonstrasi HMI Kota Padang, *Wawancara*, 27 Juli 2012
- Hidayat, Aktivist Demonstrasi GMNI Kota Padang, *Wawancara*, 10 Juli 2012
- Adrian, Aktivist Demonstrasi, DEMA IAIN Padang, *Wawancara*, 11 Juli 2012
- Michael, Aktivist Demonstrasi PMKRI Kota Padang, *Wawancara*, 28 Juli 2012
- Defrizal, Aktivist Demonstrasi PMII Kota Padang, *Wawancara*, 27 Juli 2012

Yogi Yolanda, Ketua HMI Cabang Padang, *Wawancara*, 27 Juni 2012

Sonny Manurung, Aktivist Demonstrasi PMKRI Kota Padang, *Wawancara*, 27 Juni 2012